

Peradaban dan Pemikiran Islam Masa Khulafaur Rasyidin dan Dinasti Umayyah

Nadia Saphira, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia.

Inayatillah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia.

nadiasaphira14@gmail.com

Received: 27 Juni 2026

Accepted: 24 Juli 2026

Published: 25 Juli 2026

doi:

<https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v24i1.321>

Copyright@2026 (Nadia Saphira,
Inayatillah)



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution
4.0 International License.

Abstract

The dynamics of early Islamic civilization demonstrate a close relationship between political transformation and the development of religious thought. This study examines the transformation of the political system from the period of Khulafaur Rasyidin to the Dinasti Umayyah, particularly the shift from a consultative (shura-based) system to a dynastic monarchy that significantly influenced socio-political structures and Islamic intellectual development. This research aims to analyze the factors underlying this transformation and its implications for Islamic thought. Employing a qualitative method with a historical-analytical approach through library research, the findings reveal that the transformation was driven by internal conflicts, territorial expansion, and the need for political stability. These dynamics contributed to social fragmentation and the emergence of major Islamic theological groups such as Khawarij, Shia, and Sunni. This study concludes that political transformation played a crucial role in shaping the trajectory of Islamic civilization and the development of early Islamic thought.

Keywords: Islamic Civilization, Political Transformation, Islamic Thought, Khulafaur Rasyidin, Umayyad Dynasty

Abstrak

Dinamika peradaban Islam pada periode awal menunjukkan keterkaitan erat antara perubahan sistem politik dan perkembangan pemikiran keagamaan. Penelitian ini mengkaji transformasi sistem politik dari masa Khulafaur Rasyidin ke Dinasti Umayyah, khususnya pergeseran dari sistem musyawarah (syura) menuju monarki dinastik yang berdampak pada struktur sosial dan intelektual Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi transformasi tersebut serta implikasinya terhadap pemikiran Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan historis-analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi politik dipicu oleh konflik internal, ekspansi wilayah, dan kebutuhan stabilitas kekuasaan, yang berdampak pada fragmentasi sosial serta lahirnya aliran-aliran pemikiran seperti Khawarij, Syiah, dan Ahlus Sunnah. Dengan demikian, transformasi politik berperan penting dalam membentuk arah peradaban dan perkembangan pemikiran Islam pada masa awal.

Kata Kunci: Dinamika Peradaban, Transformasi Politik, Pemikiran Islam, Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah

A. PENDAHULUAN

Dinamika peradaban Islam pada periode awal menunjukkan keterkaitan erat antara transformasi sistem politik dan perkembangan pemikiran keagamaan. Periode Khulafaur Rasyidin dan Dinasti Umayyah merupakan fase krusial dalam sejarah Islam yang tidak hanya ditandai oleh ekspansi wilayah, tetapi juga oleh perubahan mendasar dalam sistem kepemimpinan dan struktur sosial-politik umat Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan dibangun atas prinsip musyawarah (syura), legitimasi moral, dan kesederhanaan, yang mencerminkan nilai-nilai normatif Islam dalam praktik pemerintahan.¹

Namun demikian, memasuki masa Dinasti Umayyah, sistem tersebut mengalami transformasi signifikan menjadi monarki dinastik yang bersifat turun-temurun. Perubahan ini tidak hanya berimplikasi pada pola distribusi kekuasaan, tetapi juga mengubah relasi antara agama dan politik dalam masyarakat Islam.² Transformasi tersebut berlangsung dalam konteks konflik politik internal yang semakin kompleks, terutama pada akhir masa Khulafaur Rasyidin. Peristiwa seperti Perang Shiffin menjadi titik balik yang memicu fragmentasi politik dan sosial di kalangan umat Islam.³

Lebih lanjut, konflik politik tersebut tidak berhenti pada perebutan kekuasaan, tetapi berkembang menjadi perdebatan teologis yang melahirkan berbagai aliran pemikiran dalam Islam, seperti Khawarij, Syiah, dan Ahlus Sunnah.⁴ Masing-masing aliran tersebut merepresentasikan respons ideologis terhadap persoalan legitimasi kepemimpinan dan otoritas keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran Islam tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang melatarbelakanginya.⁵

Meskipun demikian, sejumlah kajian terdahulu cenderung membahas sejarah politik Islam dan perkembangan pemikiran Islam secara terpisah. Studi tentang periode awal Islam sering kali berfokus pada aspek kronologis dan ekspansi wilayah, sementara kajian teologi lebih menitikberatkan pada aspek doctrinal. Akibatnya, hubungan kausal antara transformasi politik dan perkembangan pemikiran Islam belum banyak dikaji secara integratif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara komprehensif keterkaitan antara perubahan sistem politik dan dinamika pemikiran Islam.⁶

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan transformasi sistem politik Islam dari masa Khulafaur Rasyidin ke Dinasti Umayyah, mengidentifikasi faktor-faktor konflik politik yang melatarbelakanginya, serta mengkaji implikasinya terhadap perkembangan peradaban dan pemikiran Islam, termasuk munculnya berbagai aliran teologis seperti Khawarij,

¹ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies, Third Edition, A History of Islamic Societies, Third Edition* (Cambridge University Press, 2014), <https://doi.org/10.1017/CBO9781139048828>.

² Hugh Kennedy, *The Prophet and the Age of the Caliphates, The Prophet and the Age of the Caliphates* (Routledge, 2015), <https://doi.org/10.4324/9781315673516>.

³ W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought*, Reprinted (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1998), <https://doi.org/10.25073/2525-2445/vnufs.4546>.

⁴ Mohammad Ulil and Albab Abdalah, "Western Colonialism in the Muslim World : A Historical Analysis of the Forms and Mechanisms of Domination Kolonialisme Barat Terhadap Dunia Islam : Analisis Historis Atas Bentuk Dan Mekanisme Dominasi," *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 7, no. 1 (2026): 116–23, <https://doi.org/10.20885/abhats.vol7.iss1.art10>.

⁵ Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 2016), <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/210557/teologi-islam-aliran-aliran-sejarah-analisa-perbandingan>.

⁶ Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam Conscience and History in a World Civilization The Classical Age of Islam*, Ke 1 (London: The University of Chicago Press, 1977).

Syiah, dan Ahlus Sunnah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian sejarah dan pemikiran Islam, khususnya dalam memahami hubungan antara kekuasaan politik dan perkembangan intelektual umat Islam pada periode awal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan tema kajian. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena historis dan perkembangan pemikiran Islam secara mendalam, khususnya terkait transformasi sistem politik dan implikasinya terhadap dinamika intelektual pada masa awal.⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis-analitis. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri dan merekonstruksi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin dan Dinasti Umayyah, terutama yang berkaitan dengan perubahan sistem politik dan dinamika sosial umat Islam. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji secara kritis hubungan kausal antara transformasi politik dan perkembangan pemikiran Islam, termasuk munculnya berbagai aliran teologis.⁸

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer berupa karya-karya klasik yang berkaitan dengan sejarah dan pemikiran Islam, sedangkan data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelaah, mengidentifikasi, dan mengkategorikan literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik kajian.⁹

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta historis secara sistematis, kemudian dianalisis untuk menemukan pola hubungan antara dinamika politik dan perkembangan pemikiran Islam. Analisis dilakukan melalui proses reduksi data, kategorisasi, komparasi berbagai pandangan, serta penarikan kesimpulan yang bersifat interpretative.¹⁰

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan objektif. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan interpretatif dalam menjelaskan keterkaitan antara transformasi sistem politik dan dinamika pemikiran Islam pada periode awal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik dan Transformasi Sistem Politik dari Syura ke Monarki

Transformasi sistem kepemimpinan dari era Khulafaur Rasyidin menuju Dinasti Umayyah merupakan fase krusial dalam perkembangan politik Islam. Pada

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), <https://opac.perpusnas.go.id/Detailopac.aspx?Id=1133305>.

⁸ Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D*, 19th ed. (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 45-50.

¹⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 83-90.

masa Khulafaur Rasyidin, sistem politik Islam ditandai oleh beberapa karakteristik utama, yaitu berbasis pada prinsip musyawarah (syura), legitimasi kolektif umat, serta pola kepemimpinan yang relatif egaliter dan tidak bersifat turun-temurun.¹¹ Hal ini tercermin dalam proses pengangkatan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang tidak didasarkan pada garis keturunan, melainkan pada legitimasi kolektif umat.¹² Sistem ini mencerminkan corak kepemimpinan yang relatif egaliter dan mengedepankan konsensus.

Namun, seiring berjalannya waktu, dinamika sosial-politik umat Islam mengalami perubahan signifikan. Konflik internal yang memuncak pasca terbunuhnya Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib menimbulkan instabilitas politik yang berkepanjangan, termasuk munculnya berbagai faksi dan kepentingan politik yang saling bersaing. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem berbasis syura menghadapi tantangan serius dalam menjaga stabilitas politik dalam situasi konflik yang kompleks.

Dalam konteks tersebut, Muawiyah bin Abi Sufyan tampil sebagai figur yang berhasil mengkonsolidasikan kekuatan politik dan kemudian mendirikan Dinasti Umayyah. Di bawah kepemimpinannya, terjadi pergeseran fundamental dalam sistem suksesi kepemimpinan, dari yang semula berbasis musyawarah menjadi sistem monarki yang bersifat turun-temurun. Penunjukan putranya, Yazid, sebagai penerus kekhalifahan menjadi tonggak awal perubahan tersebut. Secara konseptual, transformasi ini mencerminkan pergeseran dari legitimasi berbasis konsensus menuju legitimasi berbasis kekuasaan dinasti dan stabilitas politik.

Dengan demikian, peralihan dari sistem kepemimpinan berbasis musyawarah pada era Khulafaur Rasyidin menuju monarki dinasti Umayyah menandai titik penting dalam sejarah politik Islam. Transformasi ini tidak hanya menunjukkan perubahan struktural dalam sistem pemerintahan, tetapi juga mencerminkan ketegangan antara idealisme awal kepemimpinan Islam dengan realitas pragmatis politik. Fenomena ini menegaskan bahwa dinamika kekuasaan, legitimasi, dan kebutuhan akan stabilitas memainkan peran penting dalam membentuk arah perkembangan politik Islam pada periode awal.¹³

2. Faktor yang Melatarbelakangi Konflik Politik.

Konflik politik yang terjadi pada masa transisi dari Khulafaur Rasyidin ke Dinasti Umayyah tidak dapat dipahami sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Secara umum, faktor-faktor tersebut mencakup aspek politik, sosial, dan keagamaan. Dari aspek politik, ketiadaan mekanisme baku dalam sistem suksesi kepemimpinan pasca wafatnya Nabi Muhammad menjadi salah satu faktor utama munculnya konflik. Sistem musyawarah (syura) yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin bersifat situasional dan tidak memiliki pola yang seragam dalam setiap proses pengangkatan khalifah.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem syura secara normatif mencerminkan prinsip keadilan dan partisipasi, dalam praktiknya sistem tersebut

¹¹ Muhammad Fakhru'l Muharrom, "Peradaban Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin," *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 9, no. 1 (2024): 103–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.61815/alibrah.v9i1.376>.

¹² Syamsul Bakri, *Peta Sejarah Peradaban Islam* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011).

¹³ Auliaurrahman, "Dari Syura Ke Monarki: Perubahan Sistem Pemerintahan Dalam Sejarah Politik Islam Klasik," *JSSSR Journal Of Samudra Social Studies Research* 3, no. 1 (2025): 129–35, <https://ejurnalunsam.id/index.php/JSSSR/article/view/12615/5815>.

¹⁴ Adelia Ramzar et al., "Pemikiran Politik Pada Masa Khulafaur Rasyidin," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2025): 44–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.69714/98w93t84>.

belum mampu menyediakan mekanisme yang stabil dalam menghadapi konflik politik yang kompleks. Akibatnya, perbedaan kepentingan dan interpretasi politik di antara para sahabat tidak dapat dikelola secara efektif, sehingga memicu konflik yang lebih luas.

Dari aspek sosial, ketimpangan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap kebijakan administratif pada masa Utsman bin Affan turut memperburuk situasi politik. Munculnya isu nepotisme,¹⁵ Tuduhan nepotisme terhadap Utsman bin Affan sering kali dipandang tidak adil karena lebih didasarkan pada asal-usul para pejabat yang ia angkat, bukan pada kompetensi mereka¹⁶ dan dianggap menguntungkan kelompok tertentu memicu kritik dan resistensi dari masyarakat. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kecemburuan sosial, tetapi juga berkembang menjadi ketidakpuasan yang semakin meluas hingga berujung pada pemberontakan terhadap kekuasaan khalifah.¹⁷ Peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan menjadi bukti konkret bahwa konflik sosial-politik pada masa ini telah mencapai tahap eskalasi yang serius dan menjadi titik awal terjadinya konflik politik yang lebih besar dalam sejarah Islam.¹⁸

Kondisi tersebut semakin terlihat dalam dinamika kepemimpinan para khalifah. Pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, pemerintahan relatif stabil dengan fokus pada konsolidasi internal dan ekspansi wilayah. Namun, pada masa Utsman bin Affan, mulai muncul kritik terhadap kebijakan yang dianggap menguntungkan kelompok tertentu, sehingga memicu ketegangan sosial-politik. Situasi ini mencapai puncaknya pada masa Ali bin Abi Thalib, yang ditandai oleh konflik internal seperti Perang Jamal dan Perang Shiffin, yang berdampak pada ketidakstabilan politik dan ekonomi.

Dalam hal legitimasi, pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah tidak diakui secara menyeluruh oleh seluruh wilayah Islam. Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjabat sebagai gubernur di wilayah Syam sekaligus kerabat dekat Utsman bin Affan, menuntut penegakan hukum atas pembunuhan Utsman sebagai syarat utama sebelum memberikan baiat kepada Ali.

Perbedaan sikap ini mencerminkan adanya pertentangan dalam memahami prioritas kepemimpinan, antara stabilisasi politik yang diupayakan oleh Ali dan penegakan keadilan yang dituntut oleh Muawiyah. Ali memandang bahwa kondisi politik yang belum stabil tidak memungkinkan dilakukannya penegakan hukum secara segera, mengingat para pelaku pembunuhan tersebar dan berbaur dengan masyarakat. Sebaliknya, Muawiyah menjadikan tuntutan qisas sebagai dasar legitimasi politik untuk menolak otoritas kekhalifahan Ali.

Konflik ini tidak hanya menunjukkan perbedaan strategi politik, tetapi juga mengindikasikan adanya dualisme otoritas dalam tubuh umat Islam. Ketegangan tersebut kemudian berkembang menjadi konflik terbuka yang mencapai puncaknya dalam Perang Shiffin, yang selanjutnya diakhiri dengan peristiwa tahkim (arbitrase) dan

¹⁵ Amalia Hasanah, "Perkembangan Kebudayaan Dan Peradaban Islam Pada Masa Khulafa Ar-Rasyidin," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 3 (2025): 54.

¹⁶ Hilgha Mustin, Syamsuddin Darussalam, and Umar Sulaiman, "Peradaban Islam Pada Masa Usman Bin Affan," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 2024 (2025): 859–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.16277846>.

¹⁷ Latifa Annum Dalimunthe, "Peradaban Islam Masa Khalifah Utsman Bin Affan (24-36 H / 644-656 M)," *Al-Murabbi Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2024): 204–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.62086/al-murabbi.v2i1.170>.

¹⁸ Nazwa Ramadhani Fitrie, "Ketika Kekuasaan Di Uji: Nepotisme, Fitnah, Dan Perang Saudara Di Zaman Utsman Bin Affan Dan Ali Bin Abi Thalib," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 3 (2025): 81–83, file:///C:/Users/HP/Downloads/105.+Nazwa+Ramadhani+Fitrie+.pdf.

memperdalam fragmentasi politik umat Islam. Perpecahan tersebut pada akhirnya menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin dan menjadi titik awal munculnya sistem pemerintahan dinasti dalam sejarah Islam.¹⁹

Dari aspek keagamaan, konflik politik pada masa ini juga dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran terhadap konsep kepemimpinan dalam Islam. Sebagian kelompok berpendapat bahwa kepemimpinan harus didasarkan pada kedekatan dengan Nabi Muhammad, sementara kelompok lain menekankan pada legitimasi melalui musyawarah dan kemampuan dalam mengelola pemerintahan. Perbedaan pandangan ini semakin menguat dalam konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, terutama dalam peristiwa tahkim (arbitrase) yang menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam.

Dalam perundingan tersebut, Muawiyah menunjuk Amr bin Ash sebagai perwakilannya, sementara pihak Ali menunjuk Abu Musa Al-Asy'ari. Perundingan pun terjadi di antara dua perwakilan tersebut yang pada hasilnya merugikan pihak Ali. Amr bin Ash dengan kecerdikannya mengajak Abu Musa untuk meletakkan kedua jabatan yang dipegang Ali dan Muawiyah. Ali meletakkan jabatannya sebagai khalifah dan Muawiyah meletakkan jabatannya sebagai gubernur Syam. Abu Musa sepakat dengan hal tersebut dan meletakkan jabatan Ali sebagai Khalifah. Namun diluar dugaan, Amr bin Ash justru mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah selanjutnya setelah peletakan jabatan khalifah oleh Ali bin Abi Thalib. Abu Musa al-Asy'ari merasa tertipu atas tipu muslihat Amr bin Ash. Perundingan tersebut berakhir tanpa adanya keputusan yang jelas di antara mereka, sehingga hal ini lebih menguntungkan pihak Muawiyah dan merugikan pihak Ali sebagai khalifah sah.²⁰

Setelah peristiwa tersebut sebagian kelompok menolak hasil tahkim karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan Ilahi, yang kemudian melahirkan kelompok Khawarij sebagai bentuk oposisi terhadap kepemimpinan yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi tidak hanya bersifat politik dan sosial, tetapi juga telah berkembang menjadi konflik keagamaan yang memengaruhi cara pandang umat Islam terhadap konsep kepemimpinan dan otoritas keagamaan.

Oleh karena peristiwa *tahkim* sangat penting dalam sejarah politik negara Islam, adalah perlu untuk kita menyingkap hakikat sebenarnya pada babak babaknya di mana peristiwa ini telah disalahtanggapi dan telah disalahtafsirkan. Akibatnya timbul kesan buruk yaitu menjatuhkan kedudukan dan martabat para sahabat. Peristiwa *tahkim* yang tersebar itu telah menjadikan sebahagian sahabat sebagai penipu dan orang yang mudah terpedaya dan sebahagian yang lain dituduh sebagai perakus kuasa.²¹

Dengan demikian, konflik pada masa ini menunjukkan bahwa dinamika politik Islam awal tidak dapat dipisahkan dari dimensi keagamaan, karena perbedaan interpretasi ajaran turut membentuk arah perkembangan kekuasaan dan perpecahan umat Islam.

3. Dampak Dinamika Politik Terhadap Peradaban dan Pemikiran Islam

Dinamika politik yang terjadi pada masa transisi dari Khulafaur Rasyidin menuju Dinasti Umayyah tidak hanya berdampak pada perubahan struktur kekuasaan,

¹⁹ Ramzar et al., "Pemikiran Politik Pada Masa Khulafaur Rasyidin."

²⁰ Iqbal, "Konsekuensi Perang Shiffin Terhadap Kesatuan Umat Islam," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 13, no. 02 (2025): 96–115, <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jist.v5i9.1734>.

²¹ Fuji Rahmadi P, "DINASTI Umayyah (Kajian Sejarah Dan Kemajuannya)," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 3, no. 2 (2018): 669, <https://doi.org/10.54248/alhadi.v3i2.353>.

tetapi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan peradaban serta pembentukan pemikiran keislaman. Dalam konteks ini, politik, pemikiran, dan peradaban merupakan tiga aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, di mana perubahan dalam struktur kekuasaan turut mempengaruhi arah perkembangan intelektual dan sosial umat Islam. Fenomena ini menunjukkan adanya hubungan dialektis antara kekuasaan politik dan perkembangan intelektual dalam Sejarah Islam awal.

Konflik politik yang muncul pada periode tersebut tidak semata-mata bersifat destruktif, melainkan juga menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap lahirnya berbagai aliran teologi, perkembangan hukum Islam, serta perubahan struktur sosial umat.²² Dengan demikian, dinamika politik justru berperan dalam memperkaya khazanah intelektual Islam melalui munculnya beragam perspektif pemikiran dan perdebatan konseptual yang berkelanjutan. Dengan kata lain, konflik politik dapat dipahami sebagai katalis yang mendorong transformasi intelektual dalam masyarakat muslim.

Pada periode Khulafa' al-Rasyidin, pemikiran Islam masih berfokus pada upaya pelestarian ajaran Nabi serta pengaturan masyarakat Muslim yang baru berkembang. Isu-isu utama yang dihadapi meliputi ijtihad hukum, penetapan kebijakan politik, dan perluasan wilayah Islam. Namun, seiring dengan munculnya konflik politik, khususnya pasca terjadinya perang saudara di kalangan umat Islam, perdebatan teologis mulai berkembang secara lebih kompleks dan sistematis. Perkembangan ini menandai pergeseran dari fase normatif menuju fase reflektif dalam pemikiran Islam.

Salah satu isu teologis yang paling menonjol adalah perdebatan mengenai takdir dan kehendak bebas manusia. Kelompok Qadariyah menekankan kebebasan manusia dalam berkehendak dan bertindak, sedangkan Jabariyah berpendapat bahwa seluruh perbuatan manusia telah ditentukan oleh Allah. Perdebatan ini menjadi titik awal berkembangnya teologi rasional ('ilm al-kalām) yang kemudian mencapai bentuk yang lebih sistematis pada masa Abbasiyah.²³ Hal ini menunjukkan bahwa konflik politik tidak hanya memicu perpecahan, tetapi juga mendorong lahirnya tradisi intelektual yang lebih argumentatif dan reflektif dalam Islam. Dengan demikian, diskursus teologis berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menjelaskan realitas sosial-politik yang kompleks.

Selain itu, dinamika politik juga melahirkan kelompok-kelompok seperti Khawarij dan Syiah yang masing-masing membawa dimensi politik sekaligus teologis dalam memahami konsep kepemimpinan (imāmah) dalam Islam.²⁴ Perbedaan pandangan ini tidak hanya mencerminkan konflik politik, tetapi juga berkontribusi terhadap keragaman pemikiran dalam tradisi intelektual Islam. Perdebatan tersebut kemudian meluas dari persoalan teologis menuju praktik politik konkret, khususnya dalam diskursus mengenai khalifah.

Dalam konteks ini, khilafah menjadi persoalan fundamental yang, meskipun lebih dominan bersifat politik, juga masuk dalam kajian teologi karena melahirkan berbagai aliran pemikiran. Perdebatan mengenai khilafah tidak hanya menyangkut

²² Zainal Abidin Rahawarin, "Teologi Politik Islam (Memahami Kedudukan Politik Dalam Ajaran Islam)," *Dialektika: Jurnal Pemikiran Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 13, no. 2 (2020): 118.

²³ Abdul Halim, "Dinamika Peradaban Islam: Kajian Sejarah Pemikiran, Politik Dan Budaya," *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2026): 977–991, file:///C:/Users/HP/Downloads/70+Abdul+Halim_977-991 (1).pdf.

²⁴ Miftakhur Ridlo, "Dialektika Sunni Dan Sy i ' Ah Dalam Pemikiran Politik Islam," *Ajy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2022): 50–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.846>.

siapa yang berhak menjadi pemimpin (imam/khalifah), tetapi juga bagaimana sistem pemerintahan dijalankan. Konflik politik pasca kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, khususnya setelah peristiwa tahkim, memicu munculnya beragam aliran seperti Khawarij yang menolak arbitrase manusia dan bersikap radikal, Syi'ah yang meyakini kepemimpinan berdasarkan nash ilahi dalam garis keturunan Ali, Murji'ah yang bersikap netral dengan menunda penilaian, Muktazilah yang mengedepankan rasionalitas serta prinsip keadilan, serta Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang menegaskan legitimasi kepemimpinan melalui musyawarah dan baiat. Dengan demikian, perbedaan pandangan mengenai konsep kepemimpinan dan sumber legitimasi kekuasaan menjadi faktor utama yang melatarbelakangi keragaman aliran dalam Islam.²⁵

Perubahan sistem pemerintahan dari model musyawarah menuju monarki hereditas pada masa Dinasti Umayyah semakin mempertegas pergeseran praktik politik Islam. Dalam sistem ini, kekuasaan diwariskan secara turun-temurun, sehingga memunculkan perdebatan mendalam mengenai legitimasi politik dalam Islam terutama antara kelompok Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan Syiah dalam memahami konsep kepemimpinan. Transformasi ini menunjukkan pergeseran dari legitimasi berbasis konsensus menuju legitimasi berbasis dinasti.

Dalam perkembangan selanjutnya, perdebatan mengenai khilafah dan imamah melahirkan berbagai teori politik Islam klasik. Al-Mawardi dalam karyanya *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* menjelaskan bahwa khalifah berfungsi sebagai pelaksana syariat dan pelindung agama, bukan sebagai penguasa absolut. Sementara itu, Al-Ghazali menekankan pentingnya stabilitas politik, bahkan di bawah pemerintahan yang kurang ideal, karena kekacauan sosial dinilai lebih berbahaya daripada ketidakadilan politik. Pemikiran kedua tokoh ini menunjukkan adanya upaya intelektual untuk merespons dinamika politik sekaligus menjaga keberlangsungan tatanan sosial umat. Hal ini menegaskan bahwa teori politik Islam klasik lahir sebagai bentuk adaptasi terhadap realitas politik yang berkembang.

Di sisi lain, dinamika politik juga berdampak pada perkembangan peradaban Islam secara lebih luas, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan struktur sosial masyarakat. Pada masa Dinasti Umayyah, misalnya, mulai berkembang sistem administrasi pemerintahan yang lebih terstruktur melalui pembentukan lembaga-lembaga negara (*diwān*), serta proses arabisasi yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi.²⁶ Selain itu, perkembangan kota-kota seperti Damaskus, Kufah, dan Basrah menjadi pusat aktivitas politik, ekonomi, dan intelektual yang turut mempercepat pertumbuhan peradaban Islam. Kondisi ini memperlihatkan bahwa stabilitas politik, meskipun tidak selalu ideal, tetap berkontribusi terhadap kemajuan institusional dan kultural dalam masyarakat Islam.²⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dinamika politik pada masa awal Islam tidak hanya berimplikasi pada perubahan kekuasaan, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk pola pemikiran dan perkembangan peradaban Islam. Interaksi antara konflik politik, perdebatan teologis, dan perkembangan sosial-budaya telah melahirkan tradisi intelektual yang kaya serta menjadi fondasi bagi perkembangan pemikiran Islam pada periode-periode selanjutnya. Secara keseluruhan, dinamika ini

²⁵ Nida Wafa Nabilah, "Kajian Periode Klasik Ilmu Kalam: Sejarah, Pemikiran Dan Pengaruhnya" 13, no. 1 (2024): 11–18, <https://doi.org/10.29313/tjpi.v13i1.12956>.

²⁶ Fatkhul Wahab, "Sejarah Dan Perkembangan Bani Umayyah Dalam Dunia Islam," *Jurnal Pustaka: Media Kajian Dan Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2023): 121–35, https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnal_pusaka/article/view/1138/833.

²⁷ Rahmadi P, "DINASTI UMAYYAH (Kajian Sejarah Dan Kemajuannya)."

menegaskan bahwa sejarah politik Islam tidak dapat dipisahkan dari evolusi intelektual dan peradabannya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, transformasi sistem politik dari masa Khulafaur Rasyidin menuju Dinasti Umayyah menunjukkan adanya pergeseran signifikan dari pola kepemimpinan berbasis musyawarah (*syura*) menuju sistem monarki dinastik yang lebih terpusat. Perubahan ini dipengaruhi oleh konflik internal, ketidakjelasan mekanisme suksesi, serta kebutuhan akan stabilitas politik dalam menghadapi kompleksitas sosial yang semakin berkembang. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa konflik politik, khususnya pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, tidak hanya berdampak pada fragmentasi kekuasaan, tetapi turut mendorong lahirnya berbagai aliran teologi sebagai respons terhadap persoalan legitimasi kepemimpinan.

Selain itu, dinamika politik pada periode tersebut terbukti berkontribusi terhadap perkembangan peradaban Islam, baik dalam aspek kelembagaan, seperti pembentukan sistem administrasi yang lebih terstruktur, maupun dalam aspek intelektual melalui berkembangnya diskursus teologis dan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi politik pada masa awal Islam tidak hanya merupakan perubahan struktural kekuasaan, tetapi juga menjadi faktor determinan dalam membentuk arah perkembangan pemikiran dan peradaban Islam secara menyeluruh.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Auliaurrahman. "Dari Syura Ke Monarki: Perubahan Sistem Pemerintahan Dalam Sejarah Politik Islam Klasik." *JSSSR Journal Of Samudra Social Studies Research* 3, no. 1 (2025): 129–35.
<https://ejurnalunsam.id/index.php/JSSSR/article/view/12615/5815>.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Halim, Abdul. "Dinamika Peradaban Islam: Kajian Sejarah Pemikiran, Politik Dan Budaya." *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2026): 977–91.
[file:///C:/Users/HP/Downloads/70+Abdul+Halim_977-991 \(1\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/70+Abdul+Halim_977-991%20(1).pdf).
- Harun Nasution. *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press, 2016. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/210557/teologi-islam-aliran-aliran-sejarah-analisa-perbandingan>.
- Hasanah, Amalia. "Perkembangan Kebudayaan Dan Peradaban Islam Pada Masa Khulafa Ar-Rasyidin." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 3 (2025): 54.
- Iqbal. "Konsekuensi Perang Shiffin Terhadap Kesatuan Umat Islam." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 13, no. 02 (2025): 96–115.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jist.v5i9.1734>.
- Kennedy, Hugh. *The Prophet and the Age of the Caliphates. The Prophet and the Age of the Caliphates*. Routledge, 2015. <https://doi.org/10.4324/9781315673516>.
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies, Third Edition. A History of Islamic Societies, Third Edition*. Cambridge University Press, 2014.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781139048828>.
- Latifa Annum Dalimunthe. "Peradaban Islam Masa Khalifah Utsman Bin Affan (24- 36 H / 644-656 M)." *Al-Murabbi Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2024): 204–15.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62086/al-murabbi.v2i1.170>.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018. <https://opac.perpusnas.go.id/Detailopac.aspx?Id=1133305>.

- Marshall G. S. Hodgson. *The Venture of Islam Conscience and History in a World Civilization The Classical Age of Islam*. Ke 1. London: The University of Chicago Press, 1977.
- Muhammad Fakhrol Muharrom. "PERADABAN ISLAM PADA MASA KHULAFURASYIDIN." *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam* 9, no. 1 (2024): 103–16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61815/alibrah.v9i1.376>.
- Mustin, Hilgha, Syamsuddin Darussalam, and Umar Sulaiman. "Peradaban Islam Pada Masa Usman Bin Affan." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 2024 (2025): 859–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.16277846>.
- Nazwa Ramadhani Fitrie. "Ketika Kekuasaan Di Uji: Nepotisme, Fitnah, Dan Perang Saudara Di Zaman Utsman Bin Affan Dan Ali Bin Abi Thalib." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 3 (2025): 81–83.
- Nida Wafa Nabilah. "Kajian Periode Klasik Ilmu Kalam: Sejarah, Pemikiran Dan Pengaruhnya" 13, no. 1 (2024): 11–18.
<https://doi.org/10.29313/tjpi.v13i1.12956>.
- Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Rahawarin, Zainal Abidin. "Teologi Politik Islam (Memahami Kedudukan Politik Dalam Ajaran Islam)." *Dialektika: Jurnal Pemikiran Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 13, no. 2 (2020): 118.
- Rahmadi P, Fuji. "DINASTI UMAYYAH (Kajian Sejarah Dan Kemajuannya)." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 3, no. 2 (2018): 669. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v3i2.353>.
- Ramzar, Adelia, Muhammad Hidayat Harahap, Tengku Najib, Ahmad Kamil, Universitas Islam, Negeri Sumatera, Sumatera Utara, et al. "Pemikiran Politik Pada Masa Khulafaur Rasyidin." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2 (2025): 44–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.69714/98w93t84>.
- Ridlo, Miftakhur. "Dialektika Sunni Dan Sy i ' Ah Dalam Pemikiran Politik Islam." *Ayy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2022): 50–64.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.846>.
- Sugiyono. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D*. 19th ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syamsul Bakri. *Peta Sejarah Peradaban Islam*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011.
- Ulil, Mohammad, and Albab Abdalah. "Western Colonialism in the Muslim World : A Historical Analysis of the Forms and Mechanisms of Domination Kolonialisme Barat Terhadap Dunia Islam : Analisis Historis Atas Bentuk Dan Mekanisme Dominasi." *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 7, no. 1 (2026): 116–23.
<https://doi.org/10.20885/abhats.vol7.iss1.art10>.
- W. Montgomery Watt. *Islamic Political Thought*. Reprinted. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1998. <https://doi.org/10.25073/2525-2445/vnufs.4546>.
- Wahab, Fatkhul. "Sejarah Dan Perkembangan Bani Umayyah Dalam Dunia Islam." *Jurnal Pustaka : Media Kajian Dan Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2023): 121–35.
https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnal_pusaka/article/view/1138/833.